

**TANGGAPAN PEMERINTAH  
ATAS PANDANGAN FRAKSI  
TERHADAP PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI  
RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,  
DPD, DAN DPRD SERTA RUU TENTANG PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
JALAN MERDEKA UTARA 7  
JAKARTA PUSAT**

**TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN FRAKSI  
TERHADAP PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI  
RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
SERTA RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat,

Pemerintah telah mengikuti secara seksama pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penyampaian tanggapan dan pandangan tersebut,

Banyak pandangan-pandangan yang disampaikan sebagai respon terhadap penjelasan Pemerintah yang disampaikan pada tanggal 10 Juli yang lalu, serta terhadap kedua naskah RUU yang berkaitan dengan substansi dari kedua RUU tersebut, antara lain yang menyangkut:

1. Sistem Pemilihan.
2. Persyaratan mengikuti pemilu.
3. Alokasi kursi anggota DPR.
4. Daerah pemilihan untuk anggota DPR RI.

*Kedua*, berbagai pengalaman empirik berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

*Ketiga*, berbagai pemikiran antisipatif penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemerintah menyampaikan penghargaan dan menghormati berbagai pandangan yang telah kita dengarkan bersama. Pandangan-pandangan tersebut sesungguhnya merupakan himpunan pemikiran, yang dapat menjadi bahan-bahan yang strategis penting, bagi alternatif kemungkinan rumusan pengaturan yang dapat dibuat dalam bentuk UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berbagai alternatif perumusan pengaturan yang kelak akan difinalisasi tentu saja dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemilu, baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis sesuai azas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesemuanya dimaksudkan sebagai perwujudan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat,

Pemerintah berpendapat bahwa berbagai pandangan apapun yang berkembang akan menjadi substansi penting dalam tahapan-tahapan pembahasan selanjutnya sesuai tatacara dan mekanisme penyelesaian pembahasan RUU.

Mengingat keterkaitan substansi antara satu RUU dengan RUU yang lain dari paket UU bidang politik, Pemerintah berpendapat bahwa pembahasan atas seluruh RUU bidang politik senantiasa dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara satu RUU dengan RUU lainnya.

Demikian disampaikan tanggapan Pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Pemerintah mengenai naskah RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Akhirnya, Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dengan Panitia Khusus DPR-RI, membahas kedua RUU dimaksud melalui tahapan-tahapan yang telah disusun sesuai tatacara dan mekanisme penyelesaian pembahasan UU bik dalam forum Pansus, Panja, Timus dan Timsin, serta pada sidang paripurna yang akan datang.

Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

**MENTERI DALAM NEGERI a.i.,**

**WIDODO AS.**